

## Upaya Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Lokal Sekitar Taman Nasional Wasur

Oleh:

<sup>1</sup> Andi Patta Yusuf,<sup>2</sup> Dapot Pardamean Saragih

<sup>1,2</sup>Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Musamus

Email. [pattayusuf@unmus.ac.id](mailto:pattayusuf@unmus.ac.id)

### Abstrak

Taman Nasional Wasur tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang melekat didalamnya. Pada saat ini umumnya mengalami berbagai permasalahan dihadapi dimana telah terekam dalam media informasi yaitu perburuan hewan sejenis kanguru, rusa, cenderawasih dan pembakaran di wilayah hutan seperti data menunjukkan kejadian kebakaran hutan sejak agustus hingga september 2019 ada sekitar 44 titik api di Taman Nasional Wasur (TNW) Merauke. Permasalahan tersebut merupakan aktifitas masyarakat secara meramu dalam melangsungkan hidupnya untuk menopang perekonomian keluarga. Keberadaan Taman Nasional Wasur disyaratkan birokrasi pemerintah berupaya memberdayakan masyarakat sekitar taman nasional wasur. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan upaya birokrasi pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat lokal. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer dan sekunder. Penelitian dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan angket pertanyaan secara mendalam. Teknik Analisis data dilakukan dengan mereduksi, menyajikan dan menyimpulkan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa upaya birokrasi pemerintah dalam pemberdayaan kepada masyarakat sekitar taman nasional wasur terdapat beberapa upaya dilakukan dengan adanya kegiatan-kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat seperti: pemberian bantuan pengembangan usaha ekonomi produktif, mengola penyulingan minyak kayu putih dan mengelola budidaya anggrek dan pengembangan usaha jasa wisata. Dengan demikian pemberdayaan masyarakat memberikan nilai tambah terhadap perekonomian masyarakat lokal dan mengalihkan aktivitas masyarakat sebelumnya merusak hutan yang dilindungi menjadi aktivitas pembangunan masyarakat

**Kata Kunci :** Birokrasi Pemerintah; Pemberdayaan Masyarakat

### Abstract

*Wasur National Park is inseparable from the various problems inherent in it. At this time generally experienced various problems faced where it has been recorded in the information media, namely hunting animals such as kangaroos, deer, cenderawasih and burning in forest areas such as data showing fires from August to September 2019 there are about 44 fires in Wasur National Park (TNW) Merauke. The problem is the community's activities in carrying out their lives to support the family economy. The existence of Wasur National Park is required by the government bureaucracy to try to empower the people around Wasur National Park. The purpose of this research is to describe the efforts of government bureaucracy in the empowerment of local communities. Qualitative research method with qualitative approach. Primary and secondary data sources. The research was conducted through observations, interviews, documentation and in-depth questionnaires. Data analysis techniques are performed by reducing, presenting, and concluding. The results showed that the efforts of the government bureaucracy in empowerment to the community around the national park wasur there are several efforts made by empowerment activities to the community such as: the provision of assistance in the cultivation of productive economic business, management of eucalyptus oil refining and management of orchid cultivation and business development of tourism services. Thus community empowerment provides added value to the economy of the local community and diverts previous community activities to damage protected forests into community development activities.*

**Keywords:** Government Bureaucracy; Community Empowerment

## **PENDAHULUAN**

Kawasan Taman Nasional Indonesia memiliki posisi dan peran penting bagi kehidupan masyarakat sebagai anugerah dari Alloh, perlu untuk dimanfaatkan demi kesejahteraan rakyat atau kemanusiaan baik pada saat ini maupun di masa depannya. Perlunya pemamfaatan kawasan taman nasional ini, salah satunya ialah pemberdayaan terhadap masyarakat kawasan, sebab itu dapat diwujudkan melalui Permen Lingkungan Hidup, dan Kehutanan Republik Indonesia, Nomor P.43/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017, Tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, sebagai tindakan Pemberdayaan Masyarakat (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.43/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017). Pemberdayaan masyarakat ialah proses penguatan masyarakat dengan memberikan motivasi, dan dorongan sehingga masyarakat dapat menggali potensi dan berani bertindak untuk meningkatkan kualitas hidup mereka (Budi Riyanto, 2005), oleh sebab ini pemberdayaan masyarakat memiliki tujuan yang mulia yang semestinya dapat terwujud.

Perlu diketahui bersama di kawasan timur indonesia terdapat taman nasional yang telah ditunjuk berdasarkan SK Menhut No. 282/Kpts-VI/1997 dengan luas 413.810 ha adalah taman nasional wasur. Taman nasional wasur ini memiliki fungsi menjaga integritas perwakilan keaneka ragaman hayati lahan basah, perlindungan budaya tradisional masyarakat asli, pendukung peningkatan kualitas pembangunan regional ( pariwisata alam, sumber air bersih, dan sumber protein) dan peningkatan kesejahtraan masyarakat didalam dan sekitar hutan, baik melalui kegiatan ilmu pengetahuan, penelitian, budidaya, maupun rekayasa bio teknologi sumber plasma nutfah yang tersedia serta peningkatan peluang usaha dan lapangan kerja (Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Taman Nasional Wasur Periode 2014-2023).

Ditunjuknya taman nasional wasur sebagai taman nasional tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang melekat didalamnya, kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa kawasan taman nasional wasur pada saat ini umumnya mengalami berbagai permasalahan dihadapi dimana telah terekam dalam media informasi yaitu perburuan

hewan sejenis kanguru, rusa, cenderawasih dan pembakaran di wilayah hutan (republika.co.id), dan terdapat pula data yang menunjukkan terjadinya kebakaran hutan sejak agustus hingga september 2019 ada sekitar 44 titik api di taman nasional wasur (TNW) Merauke (infopublik.id), permasalahan tersebut merupakan aktifitas masyarakat secara meramu dalam melangsungkan hidupnya untuk menopan perekonomian mereka yang serba kekurangan. Bahkan salah satu timbulnya permasalahan hutan tidak lain masyarakat kampung itu sendiri sebab kampungnya tidak jauh dari tempat penebangan yang menjadi pilihan objek penebangan liar. Penebangan liar terjadi dengan alasan diantaranya tidak lain untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dengan membuat jual beli kayu bakar (mongabay.co.id). Hutan tidak boleh dirusak karena merupakan tempat tinggal satwa yang menjadi totem ( Nandi Kosmaryandi,2012). Harapan semestinya masyarakat kampung seharusnya melakukan pencegahan penebangan hutan namun sebaliknya, disini sangat penting upaya pemberdayaan masyarakat untuk meminimalisir terjadinya kerusakan taman nasional wasur.

Selain itu diketahui bersama dalam kawasan taman nasional dalam pengelolaan dan pemamfaatanya terdiri dari beberapa zonasi. Kondisi zonasi telah terbagi diantaranya *Pertama*, Cultural Core Zona. Zona ini memiliki fungsi terhadap perlindungan ekosistem, flora dan fauna khas dan habitatnya serta nilai-nilai yang bernilai dalam adat, sumber plasma nutfah, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dukungan budidaya hayati dan/atau difungsikan melindungi tempat dianggap suci yang terdapat dalam lanskap yang tidak terganggu. Kedua, zona rimba adat. Zona ini difungsikan yang diperuntuhkan agar pelestarian dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan alami dengan akses pola konservasi tradisional dan dimungkinkan oleh aturan adat yang akan digunakan untuk tujuan penelitian, pariwisata terbatas, pendidikan konservasi, habitat hewan dan mendukung budidaya pertanian tradisional. Ketiga, zona pemanfaatan tradisional. Zona ini difungsikan agar memastikan kelangsungan masyarakat adat, pemukiman dan pada saat yang sama dapat menjadi daya tarik ekowisata, pendidikan dan penelitian (Nandi Kosmaryandi, 2012). Di samping itu keberadaan taman nasional wasur disyaratkan birokrasi pemerintah pada Balai Taman Nasional Wasur Kabupaten Merauke memiliki salah satu tujuan untuk dapat memberdayakan masyarakat sekitar kawasan taman nasional wasur, Maka Tujuan

penelitian ini untuk mendeskripsikan upaya birokrasi pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat lokal.

## **METODE PENELITIAN**

Penggunaan pendekatan penelitian yang dilakukan ini ialah pendekatan kualitatif. Penggunaan pendekatan ini agar dapat menggambarkan kenyataan yang sedang diteliti. Selain itu, inipun sebagai pedoman dalam menganalisis dan memahami masalah yang ada pada penelitian dengan kegiatan penggunaan metode kualitatif. Jika berdasarkan sumber data yang ada, pengumpulan data dilakukan melalui dua sumber yang terdiri dari sumber primer, dan sumber sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yakni; Observasi atau pengamatan; wawancara atau interview; dokumentasi dan questioner atau angket pertanyaan. Teknik analisis data penelitian ini mempergunakan model Miles dan Huberman sebagai berikut: Reduksi data; penyajian data dan verifikasi atau kesimpulan (Sugiyono, 2016).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Keberadaan Birokrasi Pemerintah Balai Taman Nasional Wasur**

Keberadaan Birokrasi pemerintah balai taman nasional wasur memiliki fungsi dan tujuan yang mulia. Fungsi dan tujuan tersebut salah satu tidak lain di peruntukan memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat yang berada di sekitar kawasan taman nasional wasur dimana sebagai area pelaksanaan tugas dan tanggungjawab birokrasi tersebut yang melekat amanah dan kewenangannya. Keberadaan birokrasi bahwa birokrasi pemerintah atau administrasi pemerintah memiliki bentuk yang pasti di mana semua fungsi dieksekusi dengan cara yang rasional (Miftah Thoha, 2008). Keberadaan birokrasi dituntut akan kinerjanya, maka kinerja bagi sebuah organisasi merupakan tolak ukur dari keberadaan organisasi itu sendiri yang artinya semakin baik kinerja dari suatu organisasi semakin baik pula keberadannya demikian pula sebaliknya (Delly Mustafa, 2014). Keberadaan dan tindakan atau aktivitas masyarakat yang mendiami area sekitar kawasan taman nasional wasur ini memuai berbagai permasalahan dan ini masalah cukup kompleks seperti salah satunya aktivitas masyarakat yang merusak kondisi hutan yang pada hakikatnya dilindungi agar tetap lestari tapi masyarakat melakukan penebangan dan pembakaran hutan yang tidak terkontrol dan bersifat berkelanjutan. Aktivitas ini merupakan kegiatan masyarakat secara meramu atau sudah kebiasaan turuntemurun. Aktivitas masyarakat seperti penebangan hutan ini salah satu

penghasilan utama masyarakat setempat dan penghasilan masyarakat ini bagian dari memenuhi kekurangan atau ketidak cukupan kondisi ekonomi keluarga. Dengan demikian ketergantungan sebagian besar masyarakat masih mengandalkan hasil hutan sebagai sumber hidupnya. Permasalahan tersebut sangat mensyaratkan sudah keharusan birokrasi pemerintah balai taman nasional wasur melakukan upaya pemberdayaan kepada masyarakat untuk mengalihkan kebiasaan masyarakat yang dilakukannya. Realitas yang ada ini dapat di uraikan berdasarkan pendekatan pemberdayaan sehingga memberikan deskripsi atas upaya birokrasi pemerintah balai taman nasional wasur melakukan pemberdayaan kepada masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah konsep pembangunan yang meresume nilai-nilai sosial dalam masyarakat dengan mengedepankan peran aktif masyarakat, berupaya mengubah ketidak berdayaan menjadi berdaya yang mendorong keberhasilan pencapaian tujuan dalam pembangunan (Harsono, W., 2014). Oleh sebab itu upaya birokrasi pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan taman nasional wasur sekali lagi sangatlah penting sebab dapat menopan pemanfaatan dan mendukung pengolahan taman nasional wasur oleh masyarakat yang berpartisipasi atau berperan atakah berdaya dalam berbagai kegiatan aktifitas taman nasional wasur sehingga mendapat nilai tambah terhadap kesejahteraan masyarakat atau terwujudnya pemanfaatan ,pengelolaan pelestarian taman nasional bagi kesejahteraan masyarakat.

Pendekatan Pemberdayaan masyarakat ini terdapat beberapa upaya yang dapat menjadi pilihan dalam mendeskripsikan kondisi dilapangan akan pelaksanaan upaya pemberdayaan kepada masyarakat yang dilakukan. Pendekatan yang memiliki kesesuaian mengatasi masalah yang dihadapi dan mencari solusinya ialah *Social Capital* (Budi Riyanto, 2005). *Social capital* ialah modal masyarakat di mana Pembangunan ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat dengan akses peningkatan kesadaran akan kerjasama dengan nilai-nilai telah disepakati. Hasil temuan yang ditemukan pendekatan ini ialah tindakan upaya pemberdayaan masyarakat yang di lakukan oleh Balai Taman Nasional Wasur di salah satu kampung yakni Kampung Wasur terdiri dari beberapa upaya pemberdayaan seperti pemberian bantuan dan pengembangan usaha jasa wisata yang diputuskan atas nilai-nilai kesepakatan.

## **Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat Lokal Kampung Wasur.**

Pemberdayaan masyarakat secara praktis upaya yang merupakan pengarahannya sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi rakyat ini diarahkan untuk meningkatkan produktifitas rakyat sehingga baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam disekitar keberadaan rakyat dapat di tingkatkan produktifitasnya (Zainudin, A., & Suranto, S., 2014). Pemberian bantuan ini bagian dari kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh taman nasional wasur saat ini dengan memberikan bantuan usaha ekonomi seperti modal berupa barang atau alat-alat yang diharapkan dapat membantu peningkatan ekonomi masyarakat. Bantuan ini berupa bantuan usaha ekonomi produktif yang diberikan kepada masyarakat dalam hal ini kelompok masyarakat diselaraskan dengan kearifan lokal yang ada misalnya bantuan alat penyulingan minyak kayu putih dan alat budidaya anggrek. Bantuan alat penyulingan minyak kayu putih untuk keluarga masyarakat yang kegiatan sehari-harinya membuat minyak kayu putih. Pemberian bantuan alat penyulingan minyak kayu putih ini untuk mendukung pemanfaatan daun minyak kayu putih selain itu adapun pemberian bantuan bibit buah merah untuk mendukung aktivitas pembuatan minyak buah merah dan bantuan alat masak untuk mengolah dan mengupas kemiri, dimana pemanfaatan sumber daya alam tersebut merupakan kearifan lokal masyarakat. Pemberdayaan masyarakat telah memberikan manfaat dalam terwujudnya pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat walaupun belum sepenuhnya dapat diukur dengan detail, dan harapan dari pemberdayaan ini adalah mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap hutan sehingga mengurangi gangguan terhadap hutan agar tercapai kawasan taman nasional yang tetap lestari.

Adanya bantuan seperti di jelaskan diatas diharapkan juga masyarakat dapat melestarikan nilai-nilai kearifan lokal yang ada. Tujuan utama kegiatan pemberdayaan masyarakat ini selain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga untuk membantu upaya pelestarian kawasan konservasi pada umumnya dan taman nasional pada khususnya. Kawasan hutan memiliki berbagai keanekaragaman hayati yang bermanfaat terhadap kehidupan masyarakat sekitar baik dari segi fungsi ekonomi, ekologi dan sosial (Ebedly Lewerissa, 2015). Sejauh ini kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat di taman nasional wasur berupa pemberian bantuan usaha ekonomi

produktif dan hanya diberikan kepada kelompok-kelompok bukan kepada masyarakat secara umum. Pemberian bantuan berorientasi atau bertujuan untuk kemajuan masyarakat lokal dengan tetap berbasis kearifan lokal. Pemberian bantuan pada kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan harapan bermanfaat bagi upaya pelestarian sekitar kawasan taman nasional.

Pemberian bantuan kepada masyarakat lokal melalui cara atau mekanisme awalnya pembentukan kelompok masyarakat begitu pula halnya dengan jenis usaha serta bantuan yang diajukan. Kelompok merupakan kumpulan masyarakat yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota (Oja, H., & Lamalewa, F., 2017). Dalam pembentukan kelompok dilakukan secara musyawarah dengan anggota warga atau masyarakat selain menghasilkan kelompok juga menghasilkan usaha yang akan dilakukan kelompok. Disini kelompoklah yang memutuskan penentuan jenis usaha dan bantuan apa yang dibutuhkannya. Kelompok yang telah dibentuk dan memiliki keanggotaan kelompok ditentukan atas hasil musyawarah dan di setujui atas kepala kampung dan di ketahui oleh ketua LMA dan sehingga menjadi program kerja dengan masyarakat (Buttom up).

Kegiatan pemberdayaan di laksanakan dengan memberikan berupa barang dengan alasan karena bantuan tersebut yang lebih sesuai dengan kondisi masyarakat. Bantuan ini bagian dari modal usaha dan barang yang di berikan hanya sebatas untuk kelompok dengan tujuan peningkatan ekonomi kelompok dan bukan sebagai modal masyarakat secara umum. Kegiatan pemberdayaan berupa pemberian bantuan disesuaikan berdasarkan kemampuan masyarakat lokal itu sendiri. Pemberian bantuan ini mendorong peningkatan usaha ekonomi yang di kembangkan dalam program atau kegiatan pemberdayaan berbasis kearifan lokal dengan memanfaatkan HHKB dan potensi SDA yang ada. Masyarakat dapat memanfaatkan potensi SDA atau hasil hutan bukan kayu (HHBK) tanpa merusak hutan yang ada dan berlangsung terus- menerus atau sifatnya berkelanjutan. Keberlangsungan kegiatan ini belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan yang ada tetapi diharapkan kedepanya kegiatan pemberdayaan ini dapat menjadi solusi demi peningkatan kesejahteraan masyarakat tanpa harus merusak hutan. Kegiatan ini telah didampingi oleh penyuluh yang dipilih sesuai SK atau Keputusan Kepala Balai Taman Nasional Wasur Nomor : SK. 02/T.26/Tu/Peg/1/2020 Tentang

Penempatan Personalia Lingkup Balai Taman Nasional Wasur Kepala Balai. Pendampingan yang ada ini kepada masyarakat lokal dalam hal upaya pemberdayaan masyarakat masih terus perlu pendampingan yang berlanjut agar masyarakat benar-benar mampu bekerja dalam kelompok dan berproses bukan instan secara mandiri.

Kegiatan upaya pemberdayaan masyarakat ini dimana bantuan yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan anggaran yang tersedia. Sebab bantuan yang diberikan di sesuaikan dengan kebiasaan masyarakat. Maka manfaat bagi masyarakat atau kelompok berupa modal usaha barang atau jasa dapat termanfaatkan semaksimal mungkin meningkatkan taraf hidup yang sebelumnya buruk menjadi baik dan baik semakin lebih baik. Sedangkan manfaat bagi taman nasional diharapkan dapat membantu upaya pelestarian kawasan. Oleh Sebab itu, masyarakat bisa memanfaatkan HHBK di hutan kawasan taman nasional wasur dengan tanpa merusak hutan. Jika usaha berkembang dengan bisa mewujudkan kesejahteraan maka ketergantungan terhadap hutan berupa: kayu, berburu dan semua potensi yang merusak hutan akan berkurang dan sampai tidak ada lagi aktivitas yang mengakibatkan rusaknya hutan sehingga semakin lestari hutannya. Kegiatan pemberdayaan masyarakat dilihat secara kemampuan masyarakat lokal, masyarakat mampu menyesuaikan karena sudah kebiasaan sehari-hari yang dilakukan tetapi dalam proses pelaksanaan pemberdayaan belum sepenuhnya dilakukan secara benar. Kemanfaatan utama yang dapat dipikirkan oleh masyarakat lokal bahwa pemberdayaan untuk masyarakat adalah mendapat modal usaha dan manfaat buat TNW diharapkan modal usaha digunakan usaha dapat digunakan secara tepat sehingga usahannya berkesinambungan dan dapat meningkatkan ekonomi kelompok. Harapun akhir dengan ekonomi meningkat, aktivitas ke hutan semain berkurang. Namun upaya ini belum semaksimal yang diharapkan karena usaha masyarakat tidak semua dapat berkesinambungan. Usaha masyarakat yang dilakukan makin lama makin tidak ada aktivitas kelompok sebab mereka melihat apabila kegiatan yang dilakukan perlu proses yang cukup lama, mereka perlahan-lahan meninggalkan kelompok. Mereka sudah terbiasa bekerja instan, bekerja langsung terima uang tanpa memikirkan proses.



### **Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Jasa Wisata Kepada Masyarakat Lokal Kampung Wasur.**

Pandangan teori liberal menegaskan bahwa birokrasi pemerintah melaksanakan kebijakan pemerintah yang memiliki akses langsung ke masyarakat dengan mandat yang dipercayakan (Carino manila, Ledivina V., 1994). Kebijakan tersebut bagian dari pengembangan usaha jasa ini bagian selanjutnya dari pemberdayaan kepada masyarakat yang dilakukan oleh birokrasi pemerintah Balai Taman Nasional Wasur yang sudah merupakan kewenangannya. Bagian ini berupa pengembangan pusat rekreasi, kolam wasur (kawas) dalam bentuk tempat sarasehan dan bumi perkemahan biras dan pembangunan santuari wallabi. Semua ini dalam hal pemberdayaan masyarakat yang diarahkan pada pengembangan usaha jasa wisata. Dari sinilah masyarakat lokal mendapatkan pendapatan dari setiap kunjungan. Output dari pemberdayaan masyarakat melalui mengembangkan usaha jasa wisata adalah dapat memberikan kemandirian ekonomi masyarakat baik perorangan maupun kelompok secara berkelanjutan tanpa merusak ekosistem yang ada. Namun pemberdayaan masyarakat ini masih melibatkan sebagian kecil masyarakat karena masyarakat yang dilibatkan hanyalah masyarakat yang mempunyai hak wilayah atas berdirinya pengembangan usaha jasa tersebut. Dengan demikian timbul keterbatasan masyarakat yang tidak ambil andil atau berpartisipasi didalam jasa wisata tersebut menyebabkan sampai saat ini belum seluruhnya masyarakat memahami tentang tujuan kegiatan pemberdayaan masyarakat ini, hanya sebagian masyarakat saja yang memahami tujuan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Keterbatasan masyarakat disini membutuhkan dorongan dari pengelola kawasan hutan untuk membangkitkan partisipasi masyarakat (Yulian Sadono, 2013). Maka dari itu sebagai besar masyarakat masih mengandalkan hasil hutan sebagai sumber hidupnya.

### **Hambatan Yang Dihadapi Dalam Upaya Pemberdayaan Kepada Masyarakat Lokal Kampung Wasur.**

Birokrasi pemerintah adalah birokrasi publik. Birokrasi publik merupakan alat negara yang memiliki sistem administrasi dan mengimplementasikan tugas-tugas yang diselenggarakan secara sistem hierarki yang jelas serta dilaksanakan oleh aturan tertulis, terhadap bagian-bagian tertentu yang terpisah dari bagian lain, oleh orang-orang yang dipilih berdasar pada kemampuan dan keahlian mereka di bidangnya (Yusuf, A.,

Ibrahim, M., & Syahribulan, S., 2019). Pelaksanaan kegiatan atau apapun bentuk kegiatan yang dilakukan tidaklah selalu berjalan mulus sama halnya upaya birokrasi pemerintah balai taman nasional wasur dalam melaksanakan kegiatan upaya pemberdayaan kepada masyarakat dengan menemui hambatan. Hambatan utama yang dihadapi dalam kegiatan pemberdayaan adalah kerjasama dalam kelompok sering kali kelompok yang telah dibentuk tidak berjalan dengan lancar atau hanya bertahan sesaat saja. Sebab mereka melihat apabila kegiatan pemberdayaan yang dilakukan perlu proses yang cukup lama, maka masyarakat perlahan-lahan meninggalkan kelompok yang telah dibentuk.

Masyarakat lokal dengan kondisi yang ada sudah terbiasa bekerja instan, mereka bekerja dengan langsung menerima uang tanpa memikirkan proses. Adapun kelompok pemberdayaan tidak bisa berusaha secara kelompok sehingga bantuan yang diberikan hanya dijalankan oleh individu di kelompok yang telah dibentuk, dan apabila kegiatan usaha yang merupakan bantuan tadi dirasa tidak menghasilkan banyak penghasilan dan harus berproses lama mereka akan meninggalkan atau kegiatan pemberdayaan tidak dilaksanakan. kelompok yang di bentuk selama ini berdasarkan marga sebab apabila kelompok yang dibentuk secara universal ( gabungan) terkadang mereka sama sekali tidak bisa bekerja sama sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan atau keberlanjutan program. Sebab ini berhubungan dengan hak wilayah, karena marga pemilik hak wilayah tidak semuanya memiliki lahan di dekat kampung tempat pengembangan usaha jasa wisata atau penyulingan minyak kayu putih dan budidaya anggrek menjadi market tanaman anggrek, sedangkan untuk yang jauh pasti akan tidak kebagian. Hambatan yang ada ini terkait kepemilikan ulayat dan komitmen untuk maju dan berkembang, sebagai masyarakat komunal yang berbasis kebersamaan menjadi kendala apabila tidak didukung oleh seluruh komunitas. Maka disini perlu adanya keterlibatan stackholder dan pihak lainnya (Wuniyu, F., & Betaubun, W., 2019). Jadi upaya birokrasi pemerintah balai taman nasional wssur ini dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat menghadapi usaha atau kegiatan yang dilaksanakan tidak berkelanjutan atau sifatnya hanya sesaat saja. Realitas menunjukkan pemahaman masyarakat lokal atau anggota kelompok mereka akan terus dibantu dan masih belum bisa mandiri terlihat dari kasus beberapa kelompok tidak beraktivitas jika tidak ada lagi bantuan.

Kegiatan yang dikembangkan dalam pemberdayaan masyarakat disesuaikan dengan permintaan atau kebutuhan yang ada dan disepakati. Namun dengan demikian harapan akan manfaat kegiatan pemberdayaan masyarakat yakni bantuan untuk modal usaha berupa peralatan dan sebagainya dan manfaat bagi pengelola taman nasional yakni diharapkan dapat membantu upaya pelestarian kawasan tidak tercapai. Sebab tidak semua anggota kelompok memahami maksud dan tujuan dari kegiatan tersebut.

Pemahaman masyarakat lokal belum sepenuhnya semua masyarakat memahami kegiatan pemberdayaan sebagai modal masyarakat secara umum karena hanya untuk kelompok sebagai modal usaha ekonomi yang dimanfaatkan kelompok bukan sebagai fasilitas umum, ditinjau dalam pelaksanaannya ada sebagian kelompok yang paham dan menjalankan aktivitas ekonomi dan ada yang tidak sehingga ada kelompok yang masih berjalan dan ada yang tidak berjalan lagi.

## **KESIMPULAN**

Birokrasi pemerintah balai taman nasional wasur telah melakukan beberapa upaya pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan taman nasional wasur terhadap masyarakat lokal demi meningkatkan perekonomian dan mengarahkan aktivitas yang merusak hutan menjadi memanfaatkan hasil hutan bukan kayu. Keberadaan taman nasional wasur berdasarkan Pendekatan pemberdayaan *Social Capital* menunjukkan bahwa upaya birokrasi pemerintah dalam pemberdayaan kepada masyarakat sekitar kawasan taman nasional wasur berbasis masyarakat lokal terdapat beberapa upaya yang dilakukan dengan adanya kegiatan-kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat seperti: pertama pemberian bantuan pengembangan usaha ekonomi produktif dengan memenuhi kebutuhan masyarakat lokal sesuai kemampuan mereka misalnya mengola penyulingan minyak kayu putih dan mengelola budidaya anggrek menjadi market tanaman anggrek yang di ambil dari hasil hutan tanpa merusak hutan. Kedua pengembangan usaha jasa wisata dengan pengembangan pusat rekreasi, kolam wasur (kawas) dalam bentuk tempat sarasehan dan bumi perkemahan biras dan pembangunan santuari wallabi sebagai wisata menjadi target pemberdayaan masyarakat sebagai penyedia jasa wisata kedepannya yang melibatkan masyarakat lokal. Pemberdayaan masyarakat ini menemui hambatan seperti kurangnya pemahaman atau belum mengertinya masyarakat lokal dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan masyarakat yang dilibatkan hanya masyarakat yang memiliki hak wilayah atau pemberdayaan masyarakat ini masih

melibatkan sebagian kecil masyarakat karena masyarakat yang dilibatkan hanyalah masyarakat yang mempunyai hak wilayah atas berdirinya pengembangan usaha jasa tersebut dan belum adanya kerjasama yang baik antara birokrasi pemerintah balai taman nasional wasur dan masyarakat (kepercayaan publik) atau pihak lain yang bisa berkontribusi. Dengan demikian harapan pemberdayaan masyarakat belum sepenuhnya memberikan nilai tambah yang maksimal terhadap perekonomian masyarakat lokal dan mengalihkan aktivitas masyarakat sebelumnya merusak hutan yang dilindungi menjadi aktivitas lainya tanpa merusak kelestarian hutan.

Saran teruntuk birokrasi pemerintah balai taman nasional wasur dan masyarakat serta pihak lainnya, dalam mensukseskan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan kolaborasi antara berbagai pihak lain yang relevan, Sebab dengan berkolaborasi atau bekerjasama dapat mengisi kekurangan yang ada. Kolaborasi dapat dilakukan dengan pemerintahan daerah, instansi terkait maupun perguruan tinggi atau dengan lembaga masyarakat(komunitas) atau pihak lainya yang tidak dapat disebutkan satu persatu disini. Dalam mengujudkan keberhasilan pemberdayaan masyarakat perlu juga di perhatikan hal memperkuat komitmen masyarakat itu sendiri walaupun balai taman nasional wasur sudah cukup melakukan pendampingan namun masih selalu mendampingi masyarakat sampai masyarakat benar benar mandiri dalam melakukan kegiatan pemberdayan masyarakat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Budi Riyanto.( 2005). Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Dalam Perlindungan Kawasan Pelestraian alam. Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan; Bogor.
- Carino manila, Ledivina V.,(1994). Bureaucracy for Democracy, the dynamics of executive bureaucracy interaction during governmental transitions, College of Public Administration, University of the Philippines. International Center For Economic Growht And Pl.
- Delly Mustafa. (2014). Birokrasi Pemeritah edisi revisi.Bandung: Penerbit Afabeta.
- Ebedly Lewerissa. (2015). Interaksi Masyarakat Sekitar Hutan Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Hutan di Desa Wangongira, Kecamatan Tobelo Barat. *Jurnal Agroforestri*, ISSN : 1907 –7556.

- Harsono, W. (2014). Jimpitan, Modal Sosial yang Menjadi Solusi Permasalahan Masyarakat. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 18(2), 131-146. <https://doi.org/10.22146/jkap.7518>
- Nandi Kosmaryandi. (2012). Disertasi Pengembangan Zonasi Taman Nasional: Sintesis Kepentingan Konservasi Keanekaragaman Hayati Dan Kehidupan Masyarakat Adat Bogor.
- Miftah Thoha. (2008). Birokrasi Pemerintah Indonesia Di Era Reformasi edisi Pertama. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group.
- Oja, H., & Lamalewa, F. (2017). Pemberdayaan Masyarakat Petani Jagung Berbasis Kelompok Usaha Tani Dalam Meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Di Kampung Marga Mulia, Kabupaten Merauke. *Societas : Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial*, 6(2), 78-88. <https://doi.org/10.35724/Sjias.V6i2.660>
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.43/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam
- Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Taman Nasional Wasur Periode 2014-2023 Kabupaten Merauke Provinsi Papua.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, Alfabeta, Bandung.
- Wuniyu, F., & Betaubun, W. (2019). Peran Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Dalam Upaya Pelestarian Tarian Adat Suku-Suku. *Musamus Journal of Public Administration*, 2(1), 20-28. <https://doi.org/10.35724/mjpa.v2i01.2457>
- Yusuf, A., Ibrahim, M., & Syahribulan, S. (2019). Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik Pada Kantor Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (Atr / Bpn ) Kabupaten Maros. *Societas : Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial*, 8(1), 9-21. <https://doi.org/10.35724/Sjias.V8i01.1579>
- Yulian Sadono. (2013). Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Taman Nasional Gunung Merbabu di Desa Jeruk Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, Volume 9 (1): 53-64.
- Zainudin, A., & Suranto, S. (2014). Kebijakan Program Pemberdayaan Masyarakat Industri: Studi Kasus Implementasi Program Tegal Bisnis. *Journal*

*of Governance and Public Policy*, 1(1), 1-26. <http://dx.doi.org/10.18196/jgpp.2014.0001>

<https://republika.co.id/berita/oh9bhe335/balai-taman-nasional-wasur-butuh-100-polisi-hutan>.

<http://infopublik.id/kategori/nusantara/374643/balai-taman-nasional-wasur-terus-pantau-kebakaran-hutan>.

<https://www.mongabay.co.id/2017/12/27/kala-penebangan-liar-terjadi-di-taman-nasional-wasur>.